



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
30. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.383.412.567.476,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp172.326.167.221,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.555.738.734.697,00 (satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp1.370.412.567.476,00
b. Berkurang/(bertambah)	<u>Rp124.299.927.085,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.494.712.494.561,00

2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp1.380.412.567.476,00
b. Berkurang/(bertambah)	<u>Rp173.145.167.221,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.553.557.734.697,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp13.000.000.000,00
2) Berkurang/(bertambah)	<u>Rp48.026.240.136,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp61.026.240.136,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp3.000.000.000,00
2) Berkurang/(bertambah)	<u>Rp (819.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp2.181.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp58.845.240.137,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.859.615.879	145.091.853.138	24.232.237.259	20 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.835.746.986	32.862.701.284	3.026.954.298	10 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	105.000.000	105.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	105.000.000	105.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	105.000.000	105.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	11.860.000.000	13.036.954.298	1.176.954.298	10 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.860.000.000	13.036.954.298	1.176.954.298	10 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.860.000.000	13.036.954.298	1.176.954.298	10 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.765.000.000	9.765.000.000	1.000.000.000	11 %
4.1.01.15.01	PBBP2	8.765.000.000	9.765.000.000	1.000.000.000	11 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.765.000.000	9.765.000.000	1.000.000.000	11 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.035.746.986	3.685.746.986	750.000.000	25 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.935.746.986	3.685.746.986	750.000.000	26 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.935.746.986	3.685.746.986	750.000.000	26 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.540.000.000	9.873.000.000	(1.667.000.000)	14 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.890.000.000	6.663.000.000	(227.000.000)	3 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.900.000.000	4.273.000.000	373.000.000	10 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.900.000.000	4.273.000.000	373.000.000	10 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	100.000.000	(300.000.000)	75 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	100.000.000	(300.000.000)	75 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.230.000.000	1.900.000.000	(330.000.000)	15 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.230.000.000	1.900.000.000	(330.000.000)	15 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000	60.000.000	30.000.000	100 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000	60.000.000	30.000.000	100 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000	130.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000	130.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.140.000.000	2.400.000.000	(740.000.000)	24 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.040.000.000	1.190.000.000	(850.000.000)	42 %
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	50 %
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000	1.025.000.000	(775.000.000)	43 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	640.000.000	900.000.000	260.000.000	41 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	640.000.000	900.000.000	260.000.000	41 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.000.000	210.000.000	(150.000.000)	42 %
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	300.000.000	150.000.000	(150.000.000)	50 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000	810.000.000	(700.000.000)	46 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000	800.000.000	(700.000.000)	47 %
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000	800.000.000	(700.000.000)	47 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000	5.996.278.246	796.278.246	15 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.200.000.000	5.996.278.246	796.278.246	15 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.200.000.000	5.996.278.246	796.278.246	15 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.200.000.000	5.996.278.246	796.278.246	15 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.283.868.893	96.359.873.608	22.076.004.715	30 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	751.853.668	751.853.668	100 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	733.853.668	733.853.668	100 %
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	0	270.777.777	270.777.777	100 %
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0	451.548.392	451.548.392	100 %
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	11.527.499	11.527.499	100 %
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dari Bangunan	0	18.000.000	18.000.000	100 %
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0	18.000.000	18.000.000	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	20 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	20 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	20 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000	1.300.000.000	(700.000.000)	35 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000	1.300.000.000	(700.000.000)	35 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000	1.300.000.000	(700.000.000)	35 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000	1.125.766.143	625.766.143	125 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0	824.839.558	824.839.558	100 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0	824.839.558	824.839.558	100 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	300.926.585	(199.073.415)	40 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	300.926.585	(199.073.415)	40 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	84.878.819	84.878.819	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	84.878.819	84.878.819	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	84.878.819	84.878.819	100 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	89.355.038	89.355.038	100 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	80.501.638	80.501.638	100 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	80.501.638	80.501.638	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU	
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	8.853.400	8.853.400	100 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0	8.853.400	8.853.400	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	50.000.000.000	70.000.000.000	20.000.000.000	40 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	50.000.000.000	70.000.000.000	20.000.000.000	40 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	50.000.000.000	70.000.000.000	20.000.000.000	40 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.283.868.893	21.008.019.940	1.724.151.047	9 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.283.868.893	21.008.019.940	1.724.151.047	9 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.283.868.893	21.008.019.940	1.724.151.047	9 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.243.052.951.597	1.276.939.641.423	33.886.689.826	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.185.482.400.000	1.187.655.320.500	2.172.920.500	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.009.373.460.000	1.011.546.380.500	2.172.920.500	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.291.480.000	22.972.319.929	6.680.839.929	41 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.700.544.000	5.393.951.705	693.407.705	15 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.377.855.000	5.972.253.408	594.398.408	11 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	504.779.359	504.779.359	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	208.944.107	208.944.107	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	150.287	150.287	100 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000	729.697.000	27.031.000	4 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	1.072.089.000	1.072.089.000	100 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.557.927.000	7.252.440.517	3.694.513.517	104 %
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	33.662.000	53.176.470	19.514.470	58 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.784.838.076	(133.987.924)	7 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	647.617.174.000	646.307.531.529	(1.309.642.471)	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	647.617.174.000	646.307.531.529	(1.309.642.471)	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158.992.534.000	158.894.436.500	(98.097.500)	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.628.567.000	1.628.567.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.452.666.000	18.452.666.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.104.497.000	9.104.497.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	565.069.000	565.069.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.153.815.000	10.153.815.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.902.873.000	7.804.885.500	(97.987.500)	1 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.794.126.000	4.794.126.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	349.935.000	349.935.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU	
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.204.125.000	2.204.015.000	(110.000)	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.644.608.000	1.644.608.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.097.201.000	2.097.201.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.434.122.000	8.434.122.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.504.000.000	4.504.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	39.580.905.000	39.580.905.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.733.154.000	25.733.154.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.209.060.000	7.209.060.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.964.533.000	4.964.533.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.255.278.000	6.255.278.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.414.000.000	3.414.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186.472.272.000	183.372.092.542	(3.100.179.458)	2 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	56.788.230.000	56.666.234.645	(121.995.355)	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	80.464.446.000	80.464.446.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.088.000.000	2.088.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.240.092.000	10.240.092.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.956.800.000	4.501.120.000	(455.680.000)	9 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.472.690.000	1.432.700.000	(39.990.000)	3 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.397.845.000	3.384.178.400	(13.666.600)	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000	406.876.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.319.657.000	19.015.295.372	(304.361.628)	2 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	416.828.000	416.828.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.095.433.000	3.959.175.885	(2.136.257.115)	35 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000	378.173.000	(1.002.000)	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	446.200.000	418.973.240	(27.226.760)	6 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	4.781.031.000	4.781.031.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	4.781.031.000	4.781.031.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	4.781.031.000	4.781.031.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	171.327.909.000	171.327.909.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	171.327.909.000	171.327.909.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	171.327.909.000	171.327.909.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.570.551.597	89.284.320.923	31.713.769.326	55 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.070.551.597	68.455.192.923	14.384.641.326	27 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.070.551.597	68.455.192.923	14.384.641.326	27 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak: Kendaraan Bermotor	11.781.236.388	12.638.329.278	857.092.890	7 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.750.000.000	11.580.755.930	830.755.930	8 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak: Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.700.000.000	21.128.257.735	6.428.257.735	44 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak: Air Permukaan	150.000.000	284.197.226	134.197.226	89 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak: Rokok	16.689.315.209	22.823.652.754	6.134.337.545	37 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.500.000.000	20.829.128.000	17.329.128.000	495 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.500.000.000	20.829.128.000	17.329.128.000	495 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.500.000.000	20.829.128.000	17.329.128.000	495 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000	72.681.000.000	66.181.000.000	1.018 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.500.000.000	72.681.000.000	66.181.000.000	1.018 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000	5.681.000.000	(819.000.000)	13 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000	5.681.000.000	(819.000.000)	13 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000	5.681.000.000	(819.000.000)	13 %
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	67.000.000.000	67.000.000.000	100 %
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	67.000.000.000	67.000.000.000	100 %
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	67.000.000.000	67.000.000.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	1.370.412.567.476	1.494.712.494.561	124.299.927.085	9 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	928.732.529.025	989.600.709.990	60.818.180.965	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	575.644.350.116	570.098.814.969	(5.545.535.147)	1 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	407.366.088.051	398.637.205.501	(8.728.882.550)	2 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	299.566.187.677	297.516.392.952	(2.049.794.725)	1 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	290.845.299.718	282.549.038.452	(8.296.261.266)	3 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.720.887.959	14.967.354.500	6.246.466.541	72 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.865.350.503	28.882.018.658	(983.331.845)	3 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.279.309.000	27.250.134.658	(1.029.174.342)	4 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.586.041.503	1.631.884.000	45.842.497	3 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.808.187.000	9.036.108.250	227.921.250	3 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.808.187.000	9.036.108.250	227.921.250	3 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.872.015.000	21.969.116.130	97.101.130	0 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.872.015.000	21.969.116.130	97.101.130	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.536.006.000	3.154.975.500	(381.030.500)	11 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.536.006.000	3.154.975.500	(381.030.500)	11 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.353.845.000	17.832.098.716	(521.746.284)	3 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.453.845.000	16.634.403.716	(819.441.284)	5 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPIPK	900.000.000	1.197.695.000	297.695.000	33 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	273.229.727	243.534.770	(29.694.957)	11 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	273.229.727	243.534.770	(29.694.957)	11 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.091.171	4.272.697	181.526	4 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.863.000	4.004.697	141.697	4 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPIPK	228.171	268.000	39.829	17 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.176.886.869	17.530.757.828	(1.646.129.041)	9 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.676.886.869	16.810.603.828	(1.866.283.041)	10 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	500.000.000	720.154.000	220.154.000	44 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.111.914.076	617.216.000	(494.698.076)	44 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.057.966.626	581.128.000	(476.838.626)	45 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.947.450	36.088.000	(17.859.450)	33 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.347.249.330	1.850.714.000	(1.496.535.330)	45 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.173.846.809	1.742.488.000	(1.431.358.809)	45 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	173.402.521	108.226.000	(65.176.521)	38 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.451.125.698	0	(1.451.125.698)	100 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.451.125.698	0	(1.451.125.698)	100 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.031.193.309	29.886.841.243	(3.144.352.066)	10 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.031.193.309	29.769.189.594	(3.262.003.715)	10 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	33.031.193.309	29.769.189.594	(3.262.003.715)	10 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	117.651.649	117.651.649	100 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	117.651.649	117.651.649	100 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.279.288.334	126.105.907.283	5.826.618.949	5 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.008.161.777	1.059.731.777	51.570.000	5 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.412.500	3.412.500	0	0 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000	65.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	650.000	650.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.250.000	20.150.000	3.900.000	24 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	385.450.000	385.450.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	487.500	487.500	0	0 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.137.500	1.137.500	0	0 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	152.250.000	113.750.000	(38.500.000)	25 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	284.862.500	346.657.500	61.795.000	22 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	98.661.777	123.036.777	24.375.000	25 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	523.195.000	373.847.000	(149.348.000)	29 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	152.100.000	166.647.000	14.547.000	10 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.800.000	7.800.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.600.000	3.900.000	(11.700.000)	75 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	96.500.000	74.100.000	(22.400.000)	23 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.500.000	2.340.000	840.000	56 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.070.000	5.070.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	73.625.000	43.400.000	(30.225.000)	41 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.460.000	28.860.000	8.400.000	41 %
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	195.000	195.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.755.000	1.755.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.700.000	8.190.000	(6.510.000)	44 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	133.500.000	31.200.000	(102.300.000)	77 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	390.000	390.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	80.464.446.000	82.290.055.440	1.825.609.440	2 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	80.464.446.000	82.290.055.440	1.825.609.440	2 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.240.092.000	11.245.126.040	1.005.034.040	10 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	10.240.092.000	11.245.126.040	1.005.034.040	10 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.088.000.000	2.111.250.000	23.250.000	1 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.088.000.000	2.111.250.000	23.250.000	1 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.277.753.557	18.781.027.026	2.503.273.469	15 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.277.753.557	18.781.027.026	2.503.273.469	15 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.137.040.000	9.680.870.000	543.830.000	6 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.490.360.000	7.705.370.000	215.010.000	3 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	992.680.000	1.041.500.000	48.820.000	5 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	654.000.000	934.000.000	280.000.000	43 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	540.600.000	564.000.000	23.400.000	4 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	120.000.000	123.000.000	3.000.000	3 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	420.600.000	441.000.000	20.400.000	5 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.163.147.178	13.678.563.201	515.416.023	4 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	782.040.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800	84.800.800	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800	84.800.800	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800	86.179.800	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800	86.179.800	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	67.032.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.133.958.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.133.958.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500	103.576.025	(17.919.475)	15 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500	103.576.025	(17.919.475)	15 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700	38.364.175	5.904.475	18 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700	38.364.175	5.904.475	18 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	4.410.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	4.410.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000	1.102.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000	1.102.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.830	235.853	23	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.830	235.853	23	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996	499.996	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996	499.996	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.005.593.552	2.081.593.552	76.000.000	4 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.121.552	64.121.552	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.609.696	1.609.696	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.862.304	4.862.304	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.935.000.000	2.011.000.000	76.000.000	4 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.236.352.000	3.777.783.000	541.431.000	17 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.236.352.000	3.777.783.000	541.431.000	17 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000	10.000.000	(90.000.000)	90 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000	10.000.000	(90.000.000)	90 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	664.433.244	650.097.741	(14.335.503)	2 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000	6.468.000	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000	6.468.000	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280	6.083.280	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280	6.083.280	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894	656.894	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894	656.894	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400	8.400	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400	8.400	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453	13.203.453	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453	13.203.453	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	328.193.217	332.194.714	4.001.497	1 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.155.000	1.155.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22.000.000	22.000.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	220.000	220.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.500.000	6.600.000	1.100.000	20 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	130.460.000	143.406.497	12.946.497	10 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	165.000	165.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	385.000	385.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.500.000	38.500.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.415.000	78.120.000	(18.295.000)	19 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.393.217	41.643.217	8.250.000	25 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	126.940.000	108.603.000	(18.337.000)	14 %
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.900.000	47.003.000	4.103.000	10 %
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.200.000	2.200.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.400.000	1.100.000	(3.300.000)	75 %
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	24.530.000	20.900.000	(3.630.000)	15 %
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	330.000	660.000	330.000	100 %
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.430.000	1.430.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.440.000	13.090.000	(9.350.000)	42 %
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	550.000	550.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	7.040.000	9.900.000	2.860.000	41 %
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	55.000	55.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	495.000	495.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.960.000	2.310.000	(1.650.000)	42 %
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.500.000	8.800.000	(7.700.000)	47 %
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.000	110.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000	661.680.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000	211.680.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000	211.680.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000	450.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000	450.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000	478.520.000	0	0 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000	478.520.000	0	0 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000	478.520.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.208.307.136	401.349.687.187	130.141.380.051	48 %
5.1.02.01	Belanja Barang	54.875.567.970	80.117.467.893	25.241.899.923	46 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.850.112.990	80.078.253.393	25.228.140.403	46 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	257.637.527	191.266.419	(66.371.108)	26 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.090.000	93.000.459	73.910.459	387 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.888.885.079	2.059.360.533	170.475.454	9 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.250.000	4.025.000	(1.225.000)	23 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.170.000	10.321.200	9.151.200	782 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	87.145.000	109.845.000	22.700.000	26 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.781.013.457	6.896.934.322	115.920.865	2 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.220.082.274	2.184.081.368	963.999.094	79 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	301.085.000	301.745.000	660.000	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.300.000	94.670.000	(15.630.000)	14 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.547.031.379	1.675.217.885	128.186.506	8 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.617.408.582	1.872.938.485	255.529.903	16 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.698.067.516	3.604.768.781	(93.298.735)	3 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.380.000	152.714.950	12.334.950	9 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	906.718.460	1.186.973.420	280.254.960	31 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	71.880.440	161.266.940	89.386.500	124 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	340.373.085	554.829.130	214.456.045	63 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	94.710.000	103.380.000	8.670.000	9 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	281.500.000	281.500.000	100 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	14.400.000	53.234.250	38.834.250	270 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.520.182	65.079.800	(16.440.382)	20 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	377.640.645	3.897.562.426	3.519.921.781	932 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.742.267.429	76.465.349	(3.665.802.080)	98 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.993.150.000	37.620.517.550	21.627.367.550	135 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.986.872.835	3.114.367.985	127.495.150	4 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	6.620.000	2.480.000	(4.140.000)	63 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	12.952.200	952.200	(12.000.000)	93 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.050.686.850	10.614.533.641	563.846.791	6 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	943.955.050	1.213.030.300	269.075.250	29 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan: Urusan Kesehatan	99.780.000	60.600.000	(39.180.000)	39 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan: Urusan Sosial	3.000.000	0	(3.000.000)	100 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	69.300.000	69.300.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0	7.000.000	7.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	108.000.000	108.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	108.200.000	108.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180.580.000	139.900.000	(40.680.000)	23 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	332.400.000	298.505.000	(33.895.000)	10 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	54.000.000	54.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1.250.000	13.000.000	11.750.000	940 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.400.000	11.600.000	7.200.000	164 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	74.000.000	72.000.000	(2.000.000)	3 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.350.000	192.666.000	149.316.000	344 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.560.000	292.020.000	290.460.000	18.619 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	130.000.000	132.400.000	2.400.000	2 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	22.000.000	22.000.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	25.454.980	39.214.500	13.759.520	54 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.734.500	13.734.500	0	0 %
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	10.888.480	24.973.000	14.084.520	129 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	832.000	507.000	(325.000)	39 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	110.523.856.771	109.549.019.328	(974.837.443)	1 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.780.595.683	59.592.553.942	(188.041.741)	0 %
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	75.600.000	70.800.000	(4.800.000)	6 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.372.910.250	2.455.949.000	(916.961.250)	27 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	807.933.000	1.050.442.269	242.509.269	30 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	679.700.000	664.100.000	(15.600.000)	2 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanlwan	281.000.000	268.400.000	(12.600.000)	4 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	40.200.000	40.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.120.000	1.440.000	(1.680.000)	54 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	4.950.000	3.825.000	(1.125.000)	23 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	583.200.000	630.000.000	46.800.000	8 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidiklan	0	33.230.000	33.230.000	100 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.659.073.972	1.626.977.800	(1.032.096.172)	39 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	74.400.000	74.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	729.600.000	903.000.000	173.400.000	24 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	829.200.000	690.400.000	(138.800.000)	17 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.082.600.000	1.938.600.000	(144.000.000)	7 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	558.000.000	583.000.000	25.000.000	4 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	99.000.000	132.000.000	33.000.000	33 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	943.606.250	876.950.000	(66.656.250)	7 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.001.080.000	10.320.910.000	(1.680.170.000)	14 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.942.200.000	2.990.500.000	48.300.000	2 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.857.850.000	5.862.600.000	2.004.750.000	52 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.198.590.000	1.581.590.000	(617.000.000)	28 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.844.600.000	2.830.900.000	(13.700.000)	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	668.700.000	772.300.000	103.600.000	15 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	304.200.000	272.400.000	(31.000.000)	10 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.322.400.000	1.323.000.000	600.000	0 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	198.000.000	198.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	15.000.000	25.000.000	10.000.000	67 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.300.000	5.700.000	(3.600.000)	39 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000	19.350.000	16.350.000	545 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	605.000.000	570.500.000	(34.500.000)	6 %
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	91.200.000	62.200.000	(29.000.000)	32 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000	10.000.000	5.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	175.000.000	313.700.000	138.700.000	79 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.029.300.000	2.197.100.000	167.800.000	8 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	788.650.000	1.320.968.000	532.318.000	67 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000	35.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.950.000	4.450.000	500.000	13 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	63.988.000	16.350.000	(47.638.000)	74 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	17.200.000	103.400.000	86.200.000	501 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	149.925.000	300.300.000	150.375.000	100 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.190.600.000	1.322.500.000	131.900.000	11 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	37.200.000	37.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	244.849.400	267.114.660	22.265.260	9 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	150.922.750	144.437.806	(6.484.944)	4 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.673.753.066	7.844.800.505	171.047.439	2 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.361.140.000	1.551.510.000	190.370.000	14 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.686.899.995	2.599.664.902	(87.235.093)	3 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57.680.000	23.690.000	(33.990.000)	59 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	2.000.000	2.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	719.099.000	750.074.000	30.975.000	4 %
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	119.760.000	65.000.000	(54.760.000)	46 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.102.965.000	1.532.130.000	429.165.000	39 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	272.500.000	272.500.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.790.368.215	29.086.091.365	(1.704.276.850)	6 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.02.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.109.978.615	3.059.978.615	950.000.000	45 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.680.000.000	24.852.682.500	(2.827.317.500)	10 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	720.000.000	720.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	145.630.250	145.630.250	100 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	280.389.600	307.800.000	27.410.400	10 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.132.599.518	15.480.743.666	348.144.148	2 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.881.599.518	14.929.343.666	47.744.148	0 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000	0	(6.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000	1.400.000	(100.000)	7 %
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	111.000.000	145.500.000	34.500.000	31 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.500.000	3.000.000	500.000	20 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	105.000.000	396.500.000	291.500.000	278 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	859.488.000	1.190.982.000	331.494.000	39 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.200.000	11.400.000	(800.000)	7 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.100.000	306.600.000	194.500.000	174 %
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.700.000	0	(18.700.000)	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	678.850.000	842.982.000	164.132.000	24 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	37.638.000	30.000.000	(7.638.000)	20 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	10.500.000	10.500.000	100 %
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	0	10.500.000	10.500.000	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	28.550.000	28.550.000	100 %
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0	1.050.000	1.050.000	100 %
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0	21.500.000	21.500.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.178.027.000	1.081.960.000	(96.067.000)	8 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	140.000.000	70.000.000	(70.000.000)	50 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	8.027.000	11.960.000	3.933.000	49 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000	1.050.000.000	900.000.000	600 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022				
---	--	--	--	--

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	750.000.000	750.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	75.000.000	75.000.000	100 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	264.000.000	279.000.000	15.000.000	6 %
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	264.000.000	264.000.000	0	0 %
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.174.261.000	1.542.746.000	(631.515.000)	29 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	262.026.000	229.500.000	(32.526.000)	12 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.228.700.000	841.650.000	(387.050.000)	32 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	683.535.000	471.596.000	(211.939.000)	31 %
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	193.932.355	205.307.355	11.375.000	6 %
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	682.500	682.500	0	0 %
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.000.000	13.000.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	130.000	130.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.250.000	3.250.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	77.090.000	77.090.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	97.500	97.500	0	0 %
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	227.500	227.500	0	0 %
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.750.000	22.750.000	0	0 %
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	56.972.500	63.472.500	6.500.000	11 %
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.732.355	24.607.355	4.875.000	25 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	585.000	585.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	585.000	585.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.627.740.647	27.079.603.041	14.451.862.394	114 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.193.340.333	2.549.530.333	1.356.190.000	114 %
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	1.193.340.333	2.549.530.333	1.356.190.000	114 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.088.597.041	2.492.574.889	403.977.848	19 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.100.000	10.100.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.433.836	77.533.836	8.100.000	12 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	754.577.269	1.105.025.119	350.447.850	46 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.985.600	22.735.600	(250.000)	1 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABAKAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	48.000.000	48.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	158.028.872	129.528.872	(28.500.000)	10 %
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	6.300.000	1.500.000	(4.800.000)	76 %
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	1.080.000	540.000	(540.000)	50 %
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.648.000	0	(4.648.000)	100 %
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.300.000	0	(2.300.000)	100 %
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.027.000	1.287.000	(4.740.000)	79 %
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.198.012	0	(15.198.012)	100 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.525.001	3.345.000	(5.180.001)	61 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.851.000	0	(6.851.000)	100 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	51.638.410	32.543.410	(19.095.000)	37 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	178.014.041	204.989.052	26.975.011	15 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000	0	(6.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.000.000	11.000.000	8.000.000	267 %
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	9.000.000	0	(9.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.130.000	1.878.000	(8.252.000)	81 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	77.884.000	101.834.000	23.950.000	31 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.500.000	2.000.000	(1.500.000)	43 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	56.076.000	55.035.000	(1.041.000)	2 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.300.000	8.500.000	(1.800.000)	17 %
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000	568.200.000	68.200.000	14 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.628.749.946	14.547.100.398	7.918.350.452	119 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.057.586.726	3.912.807.836	1.855.221.110	90 %
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	19.500.000	0	(19.500.000)	100 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.789.237	748.362.373	697.573.136	1.373 %
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	15.699.695	0	(15.699.695)	100 %
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	188.770.498	188.770.498	0	0 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.353.108.065	7.764.281.852	4.411.173.787	132 %
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	150.000.000	150.000.000	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	99.992.380	155.622.256	55.629.876	56 %
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	250.768.505	764.020.075	513.251.570	205 %
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	376.050.000	475.850.000	99.800.000	27 %
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	149.999.981	149.999.981	0	0 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.484.245	56.984.680	55.500.435	3.739 %
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	64.980.614	179.350.847	114.370.233	176 %
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0	1.050.000	1.050.000	100 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.712.053.327	7.485.397.421	4.773.344.094	176 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	833.666.231	4.078.498.023	3.244.831.792	389 %
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	86.850.000	86.850.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	606.317.816	781.717.816	175.400.000	29 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.120.001.135	2.482.963.636	1.362.962.501	122 %
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	60.218.145	50.367.946	(9.850.199)	16 %
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	32.588.209.408	42.027.223.928	9.439.014.520	29 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.388.209.408	41.927.223.928	9.539.014.520	29 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.862.869.811	32.367.935.390	7.505.065.579	30 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.296.116.597	9.284.416.538	1.988.299.941	27 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.500.000	65.250.000	(36.250.000)	36 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.723.000	209.622.000	81.899.000	64 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	50 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	50 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.404.833.340	11.523.851.340	(1.880.982.000)	14 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.274.833.340	11.523.851.340	(1.750.982.000)	13 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	65.500.000	14.500.000	(51.000.000)	78 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	274.800.000	55.000.000	(219.800.000)	80 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	83.000.000	108.000.000	25.000.000	30 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.851.533.340	10.346.351.340	(2.505.182.000)	19 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	130.000.000	0	(130.000.000)	100 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	130.000.000	0	(130.000.000)	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABAKAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	41.024.218.748	41.024.218.748	100 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	41.024.218.748	41.024.218.748	100 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	41.024.218.748	41.024.218.748	100 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000	90.028.302.909	42.840.203.909	91 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000	90.028.302.909	42.840.203.909	91 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000	90.028.302.909	42.840.203.909	91 %
5.1.05	Belanja Hibah	81.535.371.773	17.756.207.834	(63.779.163.939)	78 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	914.441.869	1.835.807.930	921.366.061	101 %
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	914.441.869	1.835.807.930	921.366.061	101 %
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	914.441.869	1.835.807.930	921.366.061	101 %
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.412.080.000	10.232.510.000	(11.179.570.000)	52 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000	1.650.000.000	50.000.000	3 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000	1.650.000.000	50.000.000	3 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.998.600.000	8.071.660.000	73.060.000	1 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.898.600.000	7.721.660.000	(176.940.000)	2 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000	350.000.000	250.000.000	250 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.813.480.000	510.850.000	(11.302.630.000)	96 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.813.480.000	510.850.000	(11.302.630.000)	96 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	56.788.230.000	3.267.270.000	(53.520.960.000)	94 %
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	53.450.850.000	0	(53.450.850.000)	100 %
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	53.450.850.000	0	(53.450.850.000)	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.337.380.000	3.267.270.000	(70.110.000)	2 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.337.380.000	3.267.270.000	(70.110.000)	2 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	394.500.000	396.000.000	1.500.000	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	394.500.000	396.000.000	1.500.000	0 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	394.500.000	396.000.000	1.500.000	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	394.500.000	396.000.000	1.500.000	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	205.754.548.632	316.856.398.460	111.101.849.828	54 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	316.000.000	316.000.000	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	316.000.000	316.000.000	100 %
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0	316.000.000	316.000.000	100 %
5.2.01.01.02.0001	Belanja Modal Tanah Basah	0	316.000.000	316.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.043.842.625	37.966.313.951	15.922.471.326	72 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.725.000	18.160.605	13.435.605	284 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.725.000	18.160.605	13.435.605	284 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.125.000	6.160.605	2.035.605	49 %
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	600.000	0	(600.000)	100 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.802.895.800	2.799.554.200	(3.341.600)	0 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.802.895.800	2.795.954.200	(6.941.600)	0 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	175.000.000	175.000.000	100 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	302.200.000	302.200.000	100 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.556.000	0	(500.556.000)	100 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.102.339.800	1.118.754.200	16.414.400	1 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	3.600.000	3.600.000	100 %
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	3.600.000	3.600.000	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.000.000	1.323.250.000	1.257.250.000	1.905 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.000.000	0	(21.000.000)	100 %
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	21.000.000	0	(21.000.000)	100 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	35.000.000	1.313.250.000	1.278.250.000	3.652 %
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0	1.225.000.000	1.225.000.000	100 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	25.000.000	17.500.000	(7.500.000)	30 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.000.000	70.750.000	60.750.000	608 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	38.266.800	38.266.800	0	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	38.266.800	38.266.800	0	0 %
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	38.266.800	38.266.800	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.022.905.200	4.098.078.100	3.075.172.900	301 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	168.239.200	248.235.000	79.995.800	48 %
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	84.360.000	84.360.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.435.000	13.965.000	(2.470.000)	15 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	67.444.200	149.910.000	82.465.800	122 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	810.666.000	3.665.248.100	2.854.582.100	352 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	315.715.000	2.512.940.500	2.197.225.500	696 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0	32.028.400	32.028.400	100 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	173.350.000	523.425.000	350.075.000	202 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.475.000	35.620.000	18.145.000	104 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.126.000	553.234.200	253.108.200	84 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000	8.000.000	4.000.000	100 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.000.000	184.595.000	140.595.000	320 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	49.200.000	49.200.000	100 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	20.000.000	64.545.000	44.545.000	223 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.000.000	61.450.000	49.450.000	412 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000	9.400.000	(2.600.000)	22 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	176.502.860	181.804.000	5.301.140	3 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	176.502.860	181.804.000	5.301.140	3 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	71.094.130	68.690.000	(2.404.130)	3 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	42.735.000	93.114.000	50.379.000	118 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	62.673.730	20.000.000	(42.673.730)	68 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.861.748.000	7.613.683.882	(248.064.118)	3 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.190.000	27.625.232	19.435.232	237 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.190.000	27.625.232	19.435.232	237 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.853.558.000	7.586.058.650	(267.499.350)	3 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.853.558.000	7.586.058.650	(267.499.350)	3 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.831.480.000	2.556.326.720	(275.153.280)	10 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	2.528.186.720	2.528.186.720	100 %
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0	214.788.220	214.788.220	100 %
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	0	2.114.000.000	2.114.000.000	100 %
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0	199.398.500	199.398.500	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	410.480.000	0	(410.480.000)	100 %
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	410.480.000	0	(410.480.000)	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 100
 Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.000.000	7.000.000	0	0 %
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	7.000.000	7.000.000	0	0 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.414.000.000	21.140.000	(2.392.860.000)	99 %
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.414.000.000	21.140.000	(2.392.860.000)	99 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.913.018.965	8.245.056.634	2.332.037.669	39 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.052.795.000	7.727.036.000	6.674.241.000	634 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	895.795.000	7.619.536.000	6.723.741.000	751 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	157.000.000	107.500.000	(49.500.000)	32 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.860.223.965	518.020.634	(4.342.203.331)	89 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.520.640	0	(1.520.640)	100 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	123.928.825	398.020.634	274.091.809	221 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.724.774.500	20.000.000	(4.704.774.500)	100 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	40.320.000	50.320.000	10.000.000	25 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	40.320.000	50.320.000	10.000.000	25 %
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	40.320.000	50.320.000	10.000.000	25 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	3.861.888.345	3.861.888.345	100 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	3.861.888.345	3.861.888.345	100 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	3.861.888.345	3.861.888.345	100 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000	7.176.924.665	5.890.944.665	458 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000	7.176.924.665	5.890.944.665	458 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000	7.176.924.665	5.890.944.665	458 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.097.874.606	50.602.897.635	(3.494.976.971)	6 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50.534.543.265	46.082.216.074	(4.452.327.191)	9 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.257.091.265	45.290.315.101	(4.966.776.164)	10 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.592.906.425	3.232.045.982	639.139.557	25 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.417.926.945	1.548.628.643	(3.869.298.302)	71 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.398.798.036	1.368.759.496	(30.038.540)	2 %
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.925.389.652	6.099.596.402	174.206.750	3 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.789.154.060	4.564.914.336	(224.239.724)	5 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.775.311.746	9.620.709.553	2.845.397.807	49 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.937.300.000	2.661.839.449	(275.460.551)	9 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.997.395.780	1.997.111.840	(283.940)	0 %
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	12.254.813.701	11.646.869.300	(607.944.401)	5 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.995.033.432	1.842.971.319	(152.062.113)	8 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.000.000	398.750.817	198.750.817	99 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.703.778.206	679.498.214	(3.024.279.992)	82 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	318.938.750	318.938.750	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	149.181.000	309.681.000	160.500.000	108 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.120.102.282	0	(1.120.102.282)	100 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	277.452.000	791.900.973	514.448.973	185 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	277.452.000	255.432.000	(22.020.000)	8 %
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0	199.968.973	199.968.973	100 %
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	0	336.500.000	336.500.000	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.963.331.341	3.325.181.561	361.850.220	12 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.963.331.341	3.325.181.561	361.850.220	12 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.963.331.341	3.325.181.561	361.850.220	12 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000	1.195.500.000	595.500.000	99 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000	1.195.500.000	595.500.000	99 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000	1.195.500.000	595.500.000	99 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.859.381.401	217.511.498.967	90.652.117.566	71 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	109.491.401.908	195.830.894.263	86.339.492.355	79 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	101.417.538.635	177.186.921.118	75.769.382.483	75 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	101.417.538.635	177.186.921.118	75.769.382.483	75 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.073.863.273	18.643.973.145	10.570.109.872	131 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.073.863.273	18.643.973.145	10.570.109.872	131 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.406.938.493	19.366.940.200	3.960.001.707	26 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.319.487.509	10.415.416.821	2.095.929.312	25 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.587.840.553	8.488.404.127	900.563.574	12 %
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	729.959.396	1.927.012.694	1.197.053.298	164 %
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.687.560	0	(1.687.560)	100 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.125.973.199	1.384.101.291	258.128.092	23 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.125.973.199	1.384.101.291	258.128.092	23 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.961.477.785	7.567.422.088	1.605.944.303	27 %
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	729.874.847	729.874.847	0	0 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.231.602.938	6.837.547.241	1.605.944.303	31 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.640.000	17.280.000	8.640.000	100 %
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	8.640.000	17.280.000	8.640.000	100 %
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.640.000	17.280.000	8.640.000	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.505.000.000	1.256.040.504	(248.959.496)	17 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.505.000.000	1.256.040.504	(248.959.496)	17 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.505.000.000	1.256.040.504	(248.959.496)	17 %
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000	1.040.344.000	592.943.000	133 %
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000	1.040.344.000	592.943.000	133 %
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000	1.040.344.000	592.943.000	133 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.450.000	10.459.687.907	7.706.237.907	280 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Berccrak Kesenian/Kebudayaan/Ciolahraga	74.200.000	12.700.000	(61.500.000)	83 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Berccrak Kesenian	74.200.000	12.700.000	(61.500.000)	83 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	74.200.000	12.700.000	(61.500.000)	83 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.679.250.000	1.812.135.000	(867.115.000)	32 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.679.250.000	1.812.135.000	(867.115.000)	32 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0	120.000.000	120.000.000	100 %
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.379.250.000	1.692.135.000	312.885.000	23 %
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.300.000.000	0	(1.300.000.000)	100 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	8.634.852.907	8.634.852.907	100 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	8.634.852.907	8.634.852.907	100 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	8.634.852.907	8.634.852.907	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000	4.468.800.250	468.800.250	12 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.468.800.250	468.800.250	12 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.468.800.250	468.800.250	12 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.468.800.250	468.800.250	12 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.468.800.250	468.800.250	12 %
5.4	BELANJA TRANSFER	241.875.489.819	242.631.825.997	756.336.178	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.147.574.822	4.273.914.000	126.339.178	3 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.983.574.699	3.286.524.000	302.949.301	10 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.983.574.699	3.286.524.000	302.949.301	10 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.983.574.699	3.286.524.000	302.949.301	10 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123	987.390.000	(176.610.123)	15 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123	987.390.000	(176.610.123)	15 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123	987.390.000	(176.610.123)	15 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.727.914.997	238.357.911.997	629.997.000	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997	238.357.911.997	629.997.000	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997	238.357.911.997	629.997.000	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997	238.357.911.997	629.997.000	0 %
	Jumlah Belanja	1.380.412.567.476	1.553.557.734.697	173.145.167.221	13 %
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)	(58.845.240.136)	(48.845.240.136)	-488 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000	61.026.240.136	48.026.240.136	369 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.000.000.000	61.026.240.136	48.026.240.136	369 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0 %
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0	0	0 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000	30.766.251.001	17.766.251.001	137 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000	30.766.251.001	17.766.251.001	137 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000	30.766.251.001	17.766.251.001	137 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	30.259.989.135	30.259.989.135	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	29.919.591.575	29.919.591.575	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	29.919.591.575	29.919.591.575	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	121.995.355	121.995.355	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	121.995.355	121.995.355	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	218.402.205	218.402.205	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	218.402.205	218.402.205	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.000.000.000	61.026.240.136	48.026.240.136	369 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 100
Tanggal : 06 Oktober 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	2.181.000.000	(819.000.000)	27 %
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000	58.845.240.136	48.845.240.136	488 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Luwu

BASMIN MATTAYANG